

Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam

Ahmad Muslim

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

E-mail: ahmadmuslim_uai@yahoo.com

Abstrak - Konsumsi sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari kegiatan konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsumsi terhadap perekonomian Indonesia dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi di Indonesia masih rendah. Rendahnya tingkat konsumsi di Indonesia disebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Zakat sebagai salah satu sumber sumber untuk pengeluaran konsumsi belum dikelola secara baik dalam memperbaiki tingkat ekonomi penduduk. Karena sebahagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan, maka untuk meningkatkan pendapatan mereka produksi hasil pertanian harus ditingkatkan melalui peningkatan subsidi input, stabilisasi harga hasil-hasil pertanian, pendidikan dan penguatan koperasi

Abstract - Consumption plays an important roles to Indonesian economics. More than 60 percent of Indonesian Gross Domestic Product (GDP) comes from consumption. This research is aimed to study the role of consumption to Indonesia economy and its implication to public welfares. The study shows that the level of consumption in Indonesia is still low. The low level of consumption in Indonesian caused by the high level of poverty and unemployment. Zakat as one of the source of consumption consumption expenditures has not been employed effectively. Because of most of poor people live in rural areas, it is suggested that to improve their incomes. Agriculture production must be increased through government policies such as to increase input subsidies, price stabilization, of

agricultural products, education and cooperatives enhancement.

Keywords - *consumption, poverty level, education, subsidy and cooperative*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini struktur ekonomi Indonesia disebut dual ekonomi, karena perekonomian Indonesia mempraktekan ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam secara berbarengan.

Diantara mazhab ekonomi yang paling berpengaruh terhadap ekonomi konvensional adalah mazhab neo-klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Ide pokok dari Adam Smith adalah materialisme, individualisme, positivisme dan liberalisme. Jadi inti dari ajaran Adam Smith adalah keduniaan saja atau *world views*, tanpa ada unsur spiritualisme atau Ketuhanan.

Sedangkan pada dasarnya, setiap manusia menginginkan kehidupannya di dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial yang dalam ekonomi Islam disebut *falah*. Menurut Khan (1994:34) tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat) dengan mengorganisasikan sumberdaya yang ada di bumi dengan basis koperasi (kerjasama) dan partisipasi.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang

abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

Falah dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Terkecukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Dalam upaya mencapai *falah* manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering sekali terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Berbagai permasalahannya antara lain, keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan kelangkaan. Kelangkaan adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam mencapai *falah*.

Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau Negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk Negara-negara maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhinya. Kelangkaan relatif ini terjadi disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu:

1) Ketidakmerataan Distribusi Sumberdaya
Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau antar wilayah adalah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif.

2) Keterbatasan Manusia
Manusia tercipta sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal, dan hati. Meskipun demikian manusia sering kali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal.

3) Konflik Antar Tujuan Hidup
Dimungkinkan terjadinya konflik antar tujuan hidup seseorang. Adakalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya.

1.2 Peran Ilmu Ekonomi Dalam Kehidupan

Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah untuk mengatasi masalah kelangkaan relatif ini sehingga

dapat dicapai *falah*, yang diukur dengan *masalahah*. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia sebagaimana diungkapkan diatas. Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya mencakup tiga aspek, yaitu: (a) Konsumsi yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalahah, (b) Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *masalahah* tercapai dan, (c) Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *masalahah*.

Ketiga aspek konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan masalahah kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai masalahah yang maksimum bagi umat manusia bukan untuk mencapai kepuasan maksimum (*maximum utility*) seperti ajaran Mazhab Neo-Klasik. Dalam tulisan ini akan dibahas masalah konsumsi baik ditinjau dari ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3 Kebutuhan Versus Keinginan

Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia.

Tabel 1. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitnah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & Berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntutan Islam	Dibatasi	Dipenuhi

Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), UII, 2008.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi dasar konsumsi dalam meningkatkan

mashlahah adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Kebutuhan adalah fitrah, dan keinginan adalah nafsu. Kebutuhan menghasilkan manfaat dan berkah, sedangkan keinginan menghasilkan kepuasan. Kebutuhan ditentukan oleh fungsi, sementara keinginan ditentukan oleh selera. Kebutuhan bersifat obyektif, sedangkan keinginan bersifat subyektif. Ajaran Islam mengemukakan bahwa keinginan perlu dibatasi, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang seperti tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran konsumsi dalam perekonomian Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui apakah tingkat konsumsi di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsumsi Menurut Ekonomi Konvensional

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan (utility) tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Tingkat konsumsi seorang konsumen hanya ditentukan oleh kemampuan anggarannya. Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka ia akan mengonsumsi barang atau jasa dimaksud. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka barang yang semula dianggap barang mewah akan berubah menjadi barang normal atau barang inferior. Dengan demikian konsumen itu tidak pernah berhenti mengonsumsi.

2.2 Konsumsi Menurut Ekonomi Islam

Perilaku konsumsi konvensional seperti tersebut di atas tidak dapat diterima begitu saja dalam sistem ekonomi Islam. Ada berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam melakukan kegiatan konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi harus disaring dan memenuhi beberapa prinsip. Mannan (1997:47-48) menjelaskan bahwa konsumsi dikendalikan oleh 5 (lima) prinsip yaitu: (a) Keadilan: mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang dilarang oleh hukum, (b) Kebersihan: makanan harus yang baik dan cocok untuk dimakan yaitu tidak kotor dan menjijikkan, (c) Kesederhanaan: Makanan dan

minuman tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan jiwa, (d) Kemurahan hati: Makan dan minum yang halal yang disediakan oleh Tuhan tidak ada bahaya dan dosa karena makan dan minum itu disediakan atas kemurahanNya, dan (e) Moralitas: Tujuan makan dan minum bukan hanya tujuan langsung, tapi tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan menyebutkan terima kasih kepadaNya sesudah makan. Dengan demikian dia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi kebutuhan fisiknya. Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spritual dalam mencapai kebahagiaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka tidak semua makanan dan minuman dapat dikonsumsi oleh seorang muslim. Minuman keras dan makanan haram dilarang walaupun dapat memberikan kenikmatan dan keuntungan sesaat. Pelarangan tersebut untuk menghindari perselisihan, permusuhan serta dapat menghalangi ingat kepada Allah pencipta manusia.

Disamping harus memenuhi prinsip-prinsip konsumsi tersebut di atas, seorang konsumen muslim juga harus memperhatikan berbagai etika dalam mengonsumsi.

Muhammad (2004: 168-173) mengemukakan berbagai etika konsumsi yang harus diperhatikan sebagai berikut: (a) Tauhid (*Unity/Kesatuan*): Tujuan akhir dari Islam adalah menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridhaNya. Dalam mencapai tujuan tersebut harus bersumber dari Al Quran dan Hadis, (b) Adil (*Equilibrium/Keadilan*): Memberikan kepada setiap individu yang berhak menerima dan memelihara hak tersebut. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan dan menghasilkan kesejahteraan itu sendiri, (c) *Free Will* (Kehendak Bebas): Kebebasan manusia tidak terlepas dari Qadha dan Qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan kepada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Artinya Qadha dan Qadar merupakan bagian dari kehendak bebas manusia, (d) Amanah (*Responsibility/ Pertanggung jawaban*): Dalam kebebasan melakukan konsumsi, maka kegiatan konsumsi harus sesuai aturan Tuhan yang merujuk kepada dasar *halalan tayyiban* dan sederhana, (e) Halal: Kehalalan dari suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang

ditimbulkan oleh barang tersebut. Khamar diharamkan karena dapat menimbulkan keburukan bagi konsumen secara jasmani dan rohani maupun bagi orang lain dan (f) Sederhana: Artinya menempuh jalan tengah dalam berkonsumsi yaitu tidak boros tapi tidak pula kikir.

Chapra (2002 : 309) mengatakan bahwa konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda. Konsumsi : $C=C_n+C_1$ dimana C_n adalah kebutuhan dasar dan C_1 adalah barang mewah. Tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produk barang dan jasa mewah (C_1) semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar (C_n). Dengan demikian, meski terjadi peningkatan pada konsumsi agrerat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin (C_n), jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah (C_1).

Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agrerat ini (C_n dan C_1). Yang lebih banyak dibicarakan dalam makroekonomi konvensional terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi, sehingga menyebabkan analisa konsumsi tidak memberikan gambaran yang tepat.

Dalam menjelaskan konsumsi secara Islam, diasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan mashlahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang di hasilkan dari kegiatan konsumsinya

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder hasil SUSENAS dan Statistik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang relevan. Data dikumpulkan dengan mengakses langsung dari perpustakaan BPS pusat.

3.2 Metode Analisis

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan dianalisis secara deskriptif dan dilakukan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Konsumsi Masyarakat Indonesia

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sumber pertumbuhan menurut teori ekonomi makro terdiri dari Konsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G) dan Net Export (X-M), dimana X adalah ekspor dan M adalah impor. Hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan rumusan (1) seperti tersebut di atas, maka PDB Indonesia pada tahun 2010 (Tabel 1) memperlihatkan bahwa dari jumlah PDB sebesar Rp.2.310,6 Triliyun, maka sebesar 56,56 persen digunakan untuk pengeluaran konsumsi (C), 24,28 persen, pengeluaran investasi (I), 10,40 persen adalah ekspor netto (X-M). Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang juga merupakan negara Islam terlihat bahwa dari PDB sebesar 521,7 Miliar Ringgit, maka persentase pengeluaran penduduk (C) lebih kecil dari Indonesia yaitu 54,86 persen, Investasi swasta (I) adalah 14,99 persen, pengeluaran pemerintah (G) adalah 20,60 prsen, dan ekspor netto (X-M) adalah 9,55 persen.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Nasional antara Indonesia dengan Malaysia

No	Keterangan	Indonesia Rp. Triliyun (2010)	Persentase (%)	Malaysia RinggitJuta(2009) ¹⁾	Persentase (%)
1	Konsumsi Pribadi (C)	1.306,8	56,56	286.205	54,86
2	Investasi Swasta (I)	560,9	24,28	107.496	20,60
3	Pengeluaran Pemerintah(G)	196,4	8,50	78.187	14,99
4	Ekspor Netto (X-M)	240,4	10,40	49.811	9,55
5	Kesalahan Statistik	6,1	0,26	-	-
6	PDB	2.310,6	100,00	521.699	100,00

Catatan: ¹⁾ GNP angka konstan tahun 2000 : <http://tradechakra.com/malaysia/gnp-of-malaysia-152.php>
Sumber : BPS (Angka Konstan 2010-2011)

Jadi dengan besarnya pengeluaran pemerintah (G) di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia maka pembangunan infrastruktur di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, sehingga menyebabkan lebih baiknya perekonomian masyarakat di Malaysia. Hal ini terbukti dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia.

Pengeluaran konsumsi di Indonesia dapat dikelompokkan pada pengeluaran untuk makanan(F) dan pengeluaran untuk non-makanan (NF). Pengeluaran konsumsi bahan makanan per orang perbulan di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.275.227,7. Pengeluaran untuk konsumsi tersebut dapat dipisahkan antara penduduk kota dan penduduk desa. Total pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di kota adalah Rp.149 658,8 dimana Rp88.662,8 (59,24 %) digunakan untuk makanan dan Rp.60.996,0 (40,76 %) untuk non makanan. Dari konsumsi makanan tersebut Rp.32499,3 (36,65 %) digunakan untuk beras dan Rp.9.736,0 (10,98 %) digunakan untuk belanja rokok.

Di desa total konsumsi perkapita per bulan lebih kecil dari di kota yaitu Rp.125.565 dimana tapi porsi untuk makanan lebih besar yaitu sebesar Rp88.919 (71,96 %) untuk makanan dan Rp34.646 (28,04) untuk non-makanan.. Dari total pengeluaran untuk makanan maka Rp.40.914 (46,03 %) untuk beras, dan rokok Rp5.965,8 (6,7 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.

Dari data seperti yang dikemukakan terlihat bahwa sebahagian besar dari total konsumsi dihabiskan untuk makanan yang didominasi oleh beras. Rokok yang bukan kebutuhan kalori atau protein juga membutuhkan biaya yang relatif besar yaitu sekitar 30 % dari pengeluaran untuk beras. Kegiatan merokok ini jelas melanggar prinsip dan etika

konsumsi seperti yang dikemukakan oleh Mannan (1997:47-48) dan Muhammad (2004 :168-173).

Tabel 2. Perincian Pengeluaran untuk Kebutuhan Dasar (Basic Needs) di Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia per Bulan, 2008

Lokasi	Kota	Desa
Total Pengeluaran (Rp)	149.658,8	125.565
A. Makanan (%)	59,24	71,41
1. Beras	36,65	45,00
2. Rokok	10,98	13,50
3. Lainnya	11,61	12,91
B. Non Makanan (%)	40,76	28,59
Total A + B (%)	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SUSENAS 2009.

4.2 Penyebab Rendahnya Pengeluaran Konsumsi per Kapita di Indonesia

Rendahnya nilai pengeluaran konsumsi di Indonesia seperti yang disebutkan diatas yaitu rata-rata hanya sebesar Rp.275.227,7.per bulan pada tahun 2008 disebabkan besarnya jumlah penduduk miskin dibarengi dengan besarnya tingkat pengangguran.

1) Besarnya Jumlah Penduduk Miskin

Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS: 2009), merumuskan bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi konsumsi mereka mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan tersebut, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Untuk menetapkan seseorang termasuk miskin atau tidak, BPS menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Apabila tingkat pengeluarannya terletak dibawah

garis kemiskinan, maka ia termasuk golongan miskin dimana $GK = GKM + GKNM$. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2000 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan secara nasional menurut kota dan desa di Indonesia adalah Rp.195.678,- per bulan. Apabila pengeluaran perkapita dibawah nilai tersebut, maka ia sudah termasuk golongan miskin.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.

Penduduk Indonesia kelihatannya belum dapat lepas dari kemiskinan. Menurut BPS (2000: 563-564) bahwa tahun 1996 jumlah penduduk miskin adalah 22,5 juta dan pada saat krisis tahun 1999 jumlahnya meningkat menjadi 48,4 juta orang dimana sekitar 67,6 persen tinggal di daerah pedesaan. Tahun 2006-2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap besar yaitu di atas 30 juta orang.

Khan (1994:20-22) menjelaskan bahwa untuk memerangi kemiskinan memerlukan beberapa strategi sebagai berikut: (a) Strategi memerangi kemiskinan harus difokuskan kepada sumberdaya manusia melalui pengembangan *productive capacity* melalui pendidikan dan pelatihan. Manusia harus diperlakukan sebagai aset yang paling berharga dari suatu bangsa dan bukan diperlakukan sebagai *liability* atau beban suatu masyarakat, (b) Sumberdaya manusia itu harus diorganisasikan dalam bentuk koperasi lokal dalam menangani masalah mereka, (c) Sumber dana harus disediakan melalui bank koperasi berdasarkan bagi

hasil (*profit-loss sharing*), (d) Sumberdaya tersebut harus diberikan akses kepada sumberdaya fisik dan organisasi publik serta mendorong mereka membentuk organisasi secara lokal, (e) Islam menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan jujur agar dapat mengatur aset perorangan dan aset publik, (f) Strategi Islam dalam melakukan pembangunan harus fokus kepada investasi yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, udara bersih, telekomunikasi dan transportasi, (g) Pembangunan pedesaan dan perkotaan menurut konsep Islam harus seimbang dalam penyediaan kebutuhan dasar manusia. Kriteria investasi berdasarkan *Cost-Benefit Analysis* seperti yang dikemukakan investasi konvensional tidak cocok dalam mengembangkan sumberdaya manusia dimanapun mereka berada, (h) Ekonomi Islam menganjurkan pengembangan teknologi yang terencana. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pengembangan teknologi tersebut perlu dididik dan dilatih kembali. Dana untuk keperluan pendidikan dan rehabilitasi tersebut dapat diambilkan dari pengusaha-pengusaha kaya, dan (i) Di atas semuanya itu, dalam sistem Islam diperuntukkan bagi jaminan sosial pada tingkat lokal. Zakat yang terkumpul diberikan kepada mereka-mereka yang kurang mampu, sehingga mereka dapat berkembang. Pengumpulan dan pendistribusian zakat akan lebih efektif dilakukan secara lokal dari pada melalui birokrasi pusat. Ternyata zakat ini belum berperan secara signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karena lemahnya manajemen zakat di Indonesia. Belum tersedianya data mengenai zakat menunjukkan bahwa zakat masih dikelola secara tradisional, sehingga belum berpengaruh kepada perekonomian secara nasional.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2006 – 2010

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan (D)		K + D	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
2006	14.489,0	13,47	24.806,3	21,81	39.295,3	17,75
2007	13.559,3	12,52	23.609,0	20,37	37.168,3	16,58
2008	12.586,2	11,43	21.956,7	18,63	34.543,0	15,15
2009	11.910,5	10,72	20.619,4	17,35	32.530,0	14,15
2010	11.097,8	9,87	19.925,6	16,56	31.023,4	13,33

Sumber: Survey Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS (Diolah)

2) Besarnya Jumlah Pengangguran

Pengangguran menyebabkan pengeluaran untuk konsumsi menjadi lebih kecil dan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Keadaan tenaga kerja di Indonesia tahun 2004-2010 disajikan pada tabel 4.

Dari tabel 4 terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan di Indonesia melebihi delapan juta orang per tahun (2004-2010). Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tenaga kerja berpendidikan SMTA yaitu melebihi 3 juta orang per tahun. Pengangguran tenaga kerja tamatan universitas juga cukup tinggi dan mengalami trend yang meningkat yaitu dari sekitar 350 ribu orang pada tahun 2004 menjadi lebih dari 700 ribu orang pada tahun 2010. Dengan demikian terkesan bahwa usaha perguruan tinggi untuk menghasilkan para sarjana hanya menambah pengangguran tingkat tinggi.

Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan betapa sulitnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sistem ekonomi konvensional yang ada sekarang ini. Sistem ini tidak saja

menimbulkan *business cycles* tapi menimbulkan ketimpangan ekonomi yang sangat besar dalam masyarakat Indonesia. Survey dari sebuah lembaga internasional melaporkan bahwa sepertiga jumlah miliarder Singapura dengan total kekayaan 87 miliar dollar Asatau sekitar 800 triliun rupiah adalah warga negara Indonesia yang memiliki izin tinggal disana (Departemen Sosial 2008:4)

Dampak buruk dari pengangguran terhadap perekonomian adalah : (a) Tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, karena mereka kehilangan mata pencaharian , (b) Pertumbuhan ekonomi turun, karena daya beli masyarakat turun akan menimbulkan kelesuan pengusaha untuk berinvestasi, (c) Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak berkurang, karena tingkat kegiatan ekonomi rendah, objek pajak semakin sempit dan sumber penerimaan negara akan berkurang, dan (d) Pendapatan Nasional aktual yang dicapai lebih rendah daripada Pendapatan Nasional potensial, karena faktor produksi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 4. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 2004- 2010

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2004	2005 (Nov)	2006 (Agst)	2007 (Agst)	2008 (Agst)	2009 (Agst)	2010 (Agst)
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah/ Bukan Tamat SD	1.004.296	937.985	781.920	532.820	547.038	637.901	757.807
2	Sekolah Dasar	2.275.281	2.729.915	2.589.699	2.179.792	2.099.968	1.531.671	1.402.858
3	SLTP	2.690.912	3.151.231	2.730.045	2.264.198	1.973.986	1.770.823	1.661.449
4	SMTA (Umum dan Kejuruan)	3.695.504	5.106.915	4.156.708	4.070.553	3.812.522	3.879.471	3.344.315
5	Diploma I/II/III/ Akademi	237.251	308.522	278.074	397.191	362.683	441.100	443.222
6	Universitas	348.107	395.538	395.554	566.588	598.318	701.651	710.128
	TOTAL	10.251.351	12.630.106	10.932.000	10.011.142	9.394.515	8.962.617	8.319.779

Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS

Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terutama di pedesaan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kecilnya lahan pertanian per kepala keluarga. Masalah yang dihadapi petani kecil di Indonesia adalah menyustunya luas garapan petani secara signifikan. Pada tahun 1983 luas garapan petani di Jawa 0,66 ha, Sumatera 1,65 ha, Kalimantan 2,65 ha, Sulawesi 1,65 ha, NTT dan Bali 1,31 ha dan Maluku 2,64 ha, dan Indonesia secara rata-rata adalah 0,99 ha (Mubyarto, 1995:20). Sekarang luas garapan petani di Jawa hanya 0,3 ha, dan di Luar Jawa menjadi 1,0 ha. Dengan semakin berkurangnya luas rata-rata garapan petani tersebut menyebabkan produktivitas pertanian turun 0,6 persen selama kurun waktu 1993 s/d saat ini (Kompas 29 Juni 2010 :18). Berkurangnya luas garapan di sektor pertanian diperparah dengan terus terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain seperti untuk industri, perumahan jalan, dan sebagainya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pertanian telah mengalami keadaan yang disebut Tambahan Hasil Yang Semakin Berkurang (*Decreasing Return to Scale*). Artinya tenaga kerja yang dipekerjakan terhadap input tanah yang semakin kecil. Sehingga keuntungan yang diperoleh semakin kecil bahkan bisa negatif. Keadaan kemiskinan yang demikian itu membawa dampak kepada tingkat pendidikan petani

4.3 Dampak Kemiskinan Terhadap Pengeluaran untuk Konsumsi Kalori dan Protein di Indonesia

Akibat lain dari terjadinya kemiskinan dan pengangguran seperti tersebut diatas menyebabkan kebutuhan kalori belum terpenuhi disamping juga belum seimbang, sehingga kualitas konsumsi menjadi rendah. Pemenuhan kalori menurut standar gizi yaitu kecukupan kalori sebesar 2000 Kkl dan protein sebesar 52 gram per hari.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein di Indonesiapada hari digambarkan pada tabel 5.

Kalau dilihat lebih jauh, ternyata disamping jumlah kebutuhan kalori belum mencukupi, dan konsumsi protein sudah diatas standar, namun keseimbangan konsumsi kalori dan protein masih jauh dari yang dibutuhkan seperti terlihat dari tabel 6.

Tabel 5. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Sehari, 2002 – 2010

Tahun	Kalori	Protein
1999	1.849,36	48,67
2002	1.987,13	54,45
2003	1.989,89	55,37
2004	1.986,06	54,65
2005	2.007,65	55,27
2006	1.926,74	53,65
2007	2.014,91	57,66
2008	2.068,17	57,49
2009	1.927,63	54,35
2010	1.925,61	55,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SUSENAS Maret 2010

Tabel 6. Perincian Rata-rata Konsumsi Kalori Per Hari dan Protein Menurut Kelompok Makanan, 2010

No	Komoditi	Kalori	%	Protein	%
1	Padi-padian	927,05	48,14	21,76	39,56
2	Umbi-umbian	37,06	1,95	0,32	0,58
3	Ikan	45,34	2,35	7,63	13,87
4	Daging	41,14	2,14	2,55	4,64
5	Telur dan susu	56,20	2,92	3,27	5,94
6	Sayur-sayuran	38,72	2,01	2,52	4,58
7	Buah-buah	40,91	2,12	0,47	0,85
8	Minyak dan lemak	233,39	12,12	0,34	0,62
9	Makanan jadi	273,84	14,22	8,03	14,60
10	Lain-lain	231,96	12,05	8,12	14,76
	Jumlah	1925,61	100,00	55,01	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SUSENAS bulan Maret 2010

Tabel 6 menunjukkan bahwa kebutuhan kalori pada tahun 2010 belum mencukupi yaitu baru mencapai 1925,61 Kkl dari 2000 Kkl yang dibutuhkan, dan protein sudah melebihi dari 52 gram per hari. Tetapi, pemenuhan gizi tersebut terkonsentrasi pada padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak serta makanan jadi yaitu sebesar 76,41 persen untuk sumber kalori. Sedangkan sumber kalori dari ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan buah-buahan sangat sedikit. Untuk pemenuhan protein juga terkonsentrasi pada padi-padian, dan makanan jadi yaitu 54,16 persen berasal dari padi-padian dan makanan jadi,

sementara sumber protein dari ikan sudah lebih baik yaitu 13,87 persen.

Konsumsi karbohidrat untuk menghasilkan kalori lebih banyak terdapat pada masyarakat miskin, yang mengutamakan karbohidrat sebagai sumber energi untuk bekerja. Kelebihan karbohidrat dan lemak memicu kegemukan, awal munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti jantung dan diabetes mellitus. Kekurangan protein akan mengganggu kecerdasan anak, otot tubuh, lemah dan menghambat pertumbuhan. Pola asupan gizi masyarakat telah berubah karena modernisasi kehidupan yaitu meninggalkan makanan seimbang dan kaya serat dan mengutamakan makanan siap saji, yaitu makanan instan, sehingga makin banyak gangguan saluran pencernaan. Lemahnya regulasi pemerintah dalam jumlah pertumbuhan restoran siap saji yang didominasi karbohidrat, lemak, gula dan garam akan menghasilkan generasi yang tidak produktif karena mereka menderita banyak penyakit.

Pola konsumsi masyarakat seperti ini terjadi karena dominannya peran ekonomi konvensional yang mengutamakan pemenuhan keinginan dan kemewahan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cara berkonsumsi berdasarkan ekonomi Islam yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan kesederhanaan.

Untuk memenuhi keinginan kelompok masyarakat yang mempunyai atau "the have", Indonesia mengimpor berbagai hasil pertanian dari luar negeri, walaupun hampir semua komoditi yang diimpor itu dapat diproduksi di dalam negeri.

Pada tahun 2009, Indonesia mengimpor komoditi pertanian dengan total US\$ 9,32 Milyar. Jumlah Impor tersebut terdiri dari Komoditi Tanaman Pangan sebesar US\$ 2,73 Milyar, Hortikultura US\$ 1,0 Milyar, Perkebunan US 3,95 Milyar, dan Peternakan US 1,64 Milyar (Impor, BPS. 2010)

Akibat pasar bebas dan kesalahn kebijakan perdagangan, Indonesia sebagai negara maritim, juga mengimpor garam yang nilainya sangat besar. Pada tahun 2009 Indonesia mengimpor garam sebanyak 1,7 juta ton dengan nilai US \$91juta (BPS, 2010). Disamping itu pada tahun yang sama Indonesia juga mengimpor minuman beralkohol seberat 197 ton dengan nilai US \$831ribu dan minuman non-alkohol seberat 38,1 ton dengan nilai lebih dari US\$ 21 juta.

Konsekwensi dari kebijakan impor ini menyebabkan terjadinya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan skala yang besar. Hal ini disebabkan kita menggunakan cadangan devisa untuk mengimpor produk-produk yang dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Disamping itu, kebijakan impor ini menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi berkurang. Akibat lain dari kebijakan impor barang-barang konsumsi tersebut, mengakibatkan impor barang-barang modal yang sangat diperlukan dalam pembangunan menjadi berkurang.

4.4 Langkah-langkah untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

1) Perbaikan Sektor Pertanian

Seperti diketahui bahwa konsumsi beras sebagai bahagian yang terpenting dari konsumsi yang merupakan kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Namun sektor pertanian itu memiliki keterbatasan tertentu yang memerlukan keterampilan tertentu dan penanganan tertentu pula melalui kebijakan pemerintah.

Soekartawi (1989) mengemukakan bahwa keterbatasan usaha pertanian ditunjukkan oleh ciri-ciri pertanian sebagai berikut: (a) Produk pertanian adalah musiman. Artinya, tiap macam produk pertanian tidak mungkin tersedia setiap saat bila tanpa diikuti dengan manajemen stok yang baik, (b) Produk pertanian bersifat segar dan mudah rusak. Artinya tiap macam produk pertanian sebenarnya diperoleh dalam keadaan segar (masih basah), sehingga diperlukan penyimpanan, (c) Produk pertanian itu bersifat "bulky". Artinya, volumenya besar tetapi nilainya relatif kecil, (d) Produk pertanian lebih mudah terserang hama dan penyakit, (e) Produk pertanian tidak selalu mudah didistribusikan ke tempat lain, karena sifatnya yang "bulky", (f) Produk pertanian bersifat lokal atau kondisional. Misalnya tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi, tidak dapat tumbuh di daerah dataran rendah, (g) Produk pertanian mempunyai kegunaan yang beragam. Tanaman tebu dapat dibuat gula pasir di samping juga dibuat sebagai bahan baku tetes. (h) Produk pertanian kadang memerlukan keterampilan khusus yang ahlinya sulit disediakan. Misalnya membuahkan tanaman apel, dan membentuk warna pada buah apel.

Dengan berbagai keterbatasan yang dialami sektor pertanian tersebut menyebabkan hasil usaha pertanian yang dikelola oleh petani di pedesaan

yang berpendidikan rendah tersebut menyebabkan hasil pertaniannya menjadi rendah pula.

Sebahagian besar penduduk Indonesia adalah petani dan sebahagian besar mereka berdomisili di pedesaan. Mereka sekaligus juga sebagai pemakai produk yang mereka hasilkan. Pasar produk-produk pertanian termasuk kepada pasar persaingan sempurna yang dalam jangka pendek menghasilkan keuntungan yang kecil karena jumlah produksi yang dihasilkan sangat terbatas karena lahan pertanian mereka rata-rata hanya 0,30 ha. Dalam jangka panjang profitnya tidak ada, tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka tetap miskin. Dengan demikian, petani tersebut tidak dapat mengembangkan usaha pertaniannya.

Oleh sebab itu, tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka mereka hanya akan tetap menjadi orang-orang miskin. Petani-petani akan semakin miskin karena adanya ancaman globalisasi. Produk-produk luar negeri yang lebih murah dan berkualitas lebih tinggi dengan mudah masuk ke Indonesia, sehingga terjadi impor hasil-hasil pertanian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Oleh sebab itu subsidi harga input dan tarif impor hasil-hasil pertanian harus terus dipertahankan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia agar terus memperjuangkan subsidi dan tarif impor ini agar para petani masih bisa hidup. Adalah tidak fair apabila negara maju masih mensubsidi produk-produk pertaniannya, sementara negara berkembang seperti Indonesia harus mencabut subsidi pertaniannya. Arifin (2007:200-2001) menyebutkan bahwa Amerika Serikat memberikan subsidi pertanian sebesar US\$ 29 Miliar pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 memberikan subsidi sebesar US\$19 Milyar. Total subsidi negara-negara maju pertahun kepada petaninya adalah \$300 milyar.

Besarnya subsidi pertanian di Amerika Serikat ini, karena sebelumnya Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16 meyakinkan bahwa AS akan jadi Negara kuat apabila warga Negara menjadi pemilik Negara. Karena mayoritas penduduk Negara saat itu adalah petani, interpretasi keyakinan tersebut diwujudkan dalam kepemilikan lahan petani yang cukup.

Diciptakan *Homestead Act* 1862 yang melegalkan transfer tanah-tanah Negara ke pantai dengan luas per unit 65 hektar. Untuk menjamin transfer tanah-tanah Negara ke petani dengan luas per unit 65 hektar. Untuk menjamin hak hidup dan melindungi

petani dari perilaku curang dibuatlah sekitar 87 UU, misalnya dalam permasalahan ada *Agricultural Marketing Agreement Act* 1937. Lahan petani tidak menciut, tetapi justru bertambah jadi rata-rata 190 hektar (1997). Hal sama berlangsung di Malaysia, Thailand dan Jepang. Kecendrungan ini bertolak belakang dengan Indonesia. (Media Komunikasi Petani, September – Oktober 2007)

Masalah utamanya adalah terpusat pada bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia. Selama ini perhatian pemerintah terhadap pertanian sangat rendah yang tercermin dari rendahnya rasio anggaran pertanian terhadap Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) yaitu kurang dari 5 persen per tahun.

Khudory (2008) dalam Azahari (2008:177-178) menyatakan bahwa pada tahun 1952 Bung Karno telah mengingatkan pentingnya pangan dan pertanian bagi bangsa Indonesia. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa apabila masalah pangan dan pertanian ini tidak diperhatikan dengan baik akan dapat menimbulkan bencana besar. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia yang kini dikenal dengan Institute Pertanian (IPB).

Tapi, setelah hampir 60 tahun berjalan, masalah pangan dan pertanian masih menjadi masalah utama, sehingga kemiskinan dan pengangguran masih terus berlanjut.

2) Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

Apabila pembangunan ketahanan pangan difokuskan langsung pada kelompok masyarakat miskin yang sebahagian besarnya tinggal di pedesaan, maka manfaatnya akan terlihat secara jelas ketika kelompok berpendapatan rendah ini mampu memenuhi kecukupan pangan, baik energi maupun proteinnya.

Stabilitas harga menjadi salah satu dimensi yang penting dalam ketahanan pangan karena dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan. Indonesia dan negara-negara berkembang lain harus melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dengan menjaga atau mengurangi tingkat fluktuasi harga agar tidak terlalu besar. Fluktuasi harga pangan dan komoditas pertanian umumnya terjadi antar waktu karena pengaruh iklim dan cuaca (*seasonal variations*) serta perbedaan waktu

tanam dan waktu panen yang berkisar tiga bulan atau lebih. Fluktuasi harga yang cenderung mengarah pada instabilitas harga pangan juga terjadi karena pengaruh lokasi dan wilayah produksi dan konsumsi. Indonesia yang memiliki kondisi geografis demikian tersebar dan beragam, ancaman instabilitas harga pangan dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya biofisik dan sosial ekonomi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, antara sektor pedesaan dan perkotaan, serta antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.

Semenjak tahun 1967, Indonesia telah berupaya menjalankan stabilitasi harga pangan tersebut melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), dengan pasang surut prestasi yang diembannya. Ketika sistem pemerintahan berubah mengarah ke sistem pemerintahan yang demokratis dan Bulog yang harus berorientasi pada keuntungan, *setting* kelembagaan harga pangan menjadi tantangan baru. Apalagi, beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa kebijakan stabilitasi harga saat ini telah semakin mahal dan peran Bulog semakin tidak signifikan dalam stabilitasi harga beras.

Singkatnya, tingkat ketahanan pangan Indonesia saat ini memang berada di persimpangan, apakah akan mampu menuju negara berketahanan pangan tinggi dari seluruh ketiga dimensi yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas harga; atau bahkan tidak mampu menuju negara berketahanan pangan tinggi. Indonesia harus mentransformasi kelembagaan pangan menjadi lebih baik karena selama ini tidak mampu mengikuti irama perputaran roda perekonomian, sistem ekonomi politik dan kondisi eksternal lain yang berubah demikian cepat.

Ekonomi neo-klasik (neo liberal) adalah paham politik yang menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi dalam negeri. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Kebijakan luar negeri adalah melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi dan kadang-kadang intervensi militer. Mereka beranggapan bahwa pembatasan perdagangan internasional mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktifitas negara lain. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, harga produksi dan jasa

dari luar negeri akan lebih murah yang mengakibatkan berkurangnya permintaan untuk produk dan jasa dalam negeri.

Pasar bebas dimiliki oleh para penguasa pasar yaitu mereka yang menguasai dana-dana yang sangat besar, yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung mengawasi dan mengatur secara langsung atau tidak langsung mengawasi dan mengatur bekerjanya mekanisme pasar dan keluaran sebagai pemenang. Sementara pemilik modal/dana yang kecil hanya akan menjadi penonton transaksi ekonomi, menerima nasib sebagai "price taker" dan bahkan dapat terabaikan peran ekonomi mereka.

Apa yang dimaksud globalisasi saat ini sebenarnya paham dan kebijakan ekonomi neoklasik/neoliberal mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan asumsi bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan asumsi bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat globalisasi, akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, tetapi pada kenyataannya kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi.

3) Penguatan Peranan Koperasi dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Terjadinya kemiskinan dan pengangguran disamping rendahnya tingkat pendidikan juga disebabkan oleh karena kurangnya modal dan sempitnya lahan usaha tani per keluarga petani, terutama di pedesaan yang sebahagian besar pekerjaannya adalah bertani. Oleh sebab itu, untuk merangsang permodalan pembangunan pertanian di pedesaan, perlu dikembangkan suatu lembaga yang tak lain adalah koperasi baik di pedesaan maupun perkotaan. Koperasi tidak memerlukan agunan dan anggota tidak membayar bunga pinjaman seperti halnya perbankan konvensional.

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak seponatan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Mereka mempersatukan

diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dengan demikian koperasi sangat cocok untuk bagi penduduk terutama penduduk pedesaan yang sebahagian besar penduduknya miskin dan menganggur.

Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Dengan demikian koperasi menurut UUD 1945 ini dapat memberdayakan masyarakat miskin. Hal ini terbukti di negara-negara maju seperti Korea dan Taiwan.

Menurut Kurnarjo (2000:2-3) dalam Saronto (2005:290) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah bukan saja mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah, tapi juga mempengaruhi pendidikan, kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumberdaya yang ada juga rendah.

Pemilikan lahan di Korea Selatan adalah 0,12 acre (0,0486 ha per petani) dan di Taiwan 0,13 acre (0,05 ha per petani). Kalau pemilikan lahan di kedua Negara ini dikonversi ke kepada keluarga maka luas garapan ini antara Indonesia, Korea dan Taiwan relatif sama. Di Indonesia satu keluarga terdiri dari 5-6 orang. Kenapa petani Korea dan Taiwan sangat maju adalah karena teknologi budidayanya dan koperasinya sangat maju. Teknologi dapat menggeser kurva fungsi produksi keatas, sedangkan koperasi dapat menghimpun modal dan menciptakan persatuan yang kuat antara anggotanya, sehingga melahirkan kemakmuran.

Kenapa tabungan rendah? Tabungan penduduk berasal dari pendapatan yang disisihkannya. Apabila pendapatannya kecil, tentu tabungannya juga kecil bahkan tidak ada sama sekali. Sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat

pedesaan adalah bertani yang luas garapannya sangat kecil. Oleh sebab itu, koperasi adalah merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. Hal ini disebabkan karena dukungan pendanaan dari perbankan untuk pertanian, industri kecil dan pedagang kecil sangat kurang diminati oleh perbankan karena bidang usaha tersebut mempunyai resiko tinggi. Di lain pihak, unit ekonomi kecil tersebut tidak bankable karena tidak dapat menyediakan agunan sementara tingkat suku bunga bank sangat tinggi.

Selama ini koperasi kurang memberikan kontribusi pada perekonomian penduduk karena terjadinya kesalahan pada pengurus koperasi, bukan dari anggota koperasinya.

Masyarakat miskin perlu didorong untuk menjadi anggota koperasi, baik koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit, karena koperasi lah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi mereka yang tidak mempunyai uang untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib perlu di *bail out* oleh pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah selanjutnya berkewajiban membina mereka sampai mereka benar-benar mandiri dan menyadari sepenuhnya pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Masyarakat miskin tidak mungkin untuk memperoleh modal dari perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan kesejateraan.

V. KESIMPULAN

Konsumsi berperan sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Tingkat konsumsi berkaitan erat dengan kemiskinan dan pengangguran. Sebahagian besar pendapatan masyarakat Indonesia digunakan untuk konsumsi terutama untuk pengeluaran makanan, dan sebahagian kecil yang digunakan untuk non-makanan. Besarnya porsi pendapatan ini untuk bahan makanan menunjukkan masyarakat Indonesia masih jauh dari sejahtera. Dengan demikian mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.

Bahkan konsumsi kalori saja belum mencukupi, walaupun konsumsi protein sudah terpenuhi dalam jumlah, tapi belum dalam kualitasnya. Sumber kalori dari karbohidrat yang berasal dari padi-padian, lemak dan makanan jadi masih terlalu

tinggi. Hal ini akan menghasilkan generasi yang lemah dan tidak sehat.

Penyebab dari kemiskinan dan pengangguran ini adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, dan kecilnya luas garapan per rumah tangga dan kurangnya modal petani di pedesaan. Negara-negara maju seperti Korea dan Taiwan juga mengalami luas garapan yang kecil, tapi mereka sangat makmur. Penyebabnya disamping tingkat pendidikan yang sudah tinggi, juga karena mereka menghimpun diri dalam suatu gerakan koperasi, sehingga masalah kekurangan modal dapat diatasi.

Belum berhasilnya Negara kita mengentaskan kemiskinan, karena terlalu dominannya peran ekonomi konvensional dalam pengembangan perekonomian nasional yang menghasilkan ketimpangan yang besar antara pelaku-pelaku ekonomi. Sementara itu, peran koperasi juga belum optimal karena pengelolaan koperasi belum begitu baik. Mubyarto (1995) menyatakan bahwa prosedur dalam memperoleh kredit dari koperasi berbelit-belit. Oleh sebab itu perlu pembenahan pengelolaan koperasi yang lebih baik agar koperasi dapat memainkan peranannya dalam mengentaskan kemiskinan. Di Departemen pertanian sendiri ada program pengembangan koperasi, tapi ternyata sebagian besar penduduk miskin masih berada di sektor pertanian tersebut. Dengan demikian, peran koperasi belum seperti yang diharapkan disamping kurangnya komitmen pemerintah dalam memajukan koperasi.

Disarankan kepada pemerintah agar meningkatkan pendidikan (formal dan non-formal) para petani dan penduduk lainnya di luar pertanian seperti industri rumah tangga sehingga mereka lebih mudah dalam memahami kemajuan teknologi di bidang pertanian dan industri. Pemerintah juga perlu mendorong terbentuknya koperasi-koperasi di pedesaan sehingga kekurangan modal dapat diatasi. Dengan demikian diharapkan bahwa penduduk Indonesia menjadi lebih sejahtera. Apa lagi koperasi sejalan dengan ajaran Islam yang sifatnya bagi hasil dan tidak menggunakan bunga bank sebagai basis kegiatan ekonomi. Zakat yang mempunyai potensi tinggi dalam meningkatkan ekonomi umat, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga konsumsi masyarakat yang masih rendah dapat meningkat. Sampai ini, data mengenai penerimaan dan penyaluran zakat belum tersedia yang menunjukkan bahwa zakat masih belum berperan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat muslim di Indonesia.

DAFTAR ACUAN/PUSTAKA

- [1] Azahari, Delima Hasri (2008). Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional.. Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis), Volume 6 Nomor 2, Juni 2008.. Akreditasi Nomor: 45/AKREDITASI-LIPI/P2MBI/9/2006 ISSN: 1693-2021.
- [2] Badan Pusat Statistik (2009). *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Buku 1: Propinsi, Jakarta.
- [3] Departemen Pertanian (1995). *Repelita VI Pertanian*. Jakarta
- [4] Departemen Sosial (2008). Laporan Utama. Sinar, Majalah Penyuluhan Sosial Edisi I/2008/nomor 137. ISSN: 01260006, Jakarta.
- [5] Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian (2006). Fasilitas Sekretariat Sidang-sidang Multilateral (VII). Trade Policy Review Mechanism (TPRM IV), Jakarta.
- [6] Google(2010)<http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi>
- [7] Khan, Muhammad Akram (1994). Introduction to Islamic Economics). International Institute of Islamic Thought and Institute of policy Studies. Islamization of Knowledge – 15, Percetakan Zafar SDN BHD, Kuala Lumpur.
- [8] Mannan, M. Abdul, Prof., M.A., Ph.D.(1997). Teori dan Praktek Ekonomi Islam.Penerbit PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- [9] Mubyarto (1995). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES, Jakarta.
- [10] Muhammad, Drs., M.Ag. (2004) Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam.BPFE Yogyakarta, Edisi 2004/2005.
- [11] Murni, Asfia, S.E., M.Pd.(2006). *Ekonomika Makro*.Diterbitkan oleh Refika Aditama, ISBN 979-1073-04-x, Bandung.
- [12] Muslim, Ahmad (2002). *Perkembangan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Kalam Mulia, ISBN : 979-8590-46-5, Jakarta.
- [13] Nasution, Mustafa Edwin, Muhammad Arief Mufrani, Budi Setyanto, Bey Sapta Utama,dan Nurul Huda (2007) *Ekonomi Islam*.Pengenalan Eklusif.ISSBN 979-3925-56-6 Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [14] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Bank Indonesia (2008). *Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [15] Saronto, Mahatmi dan R. Wrihatnolo (2005).Rekonseptualisasi Perencanaan Pembangunan. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomidi Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Buku 5 (1997-2005). Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) dan Penerbit Kanisus
- [16] Suprayitno, Eko (2005). *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Penerbit Graha Ilmu. ISBN 979-756-019-2, Yogyakarta.